

RENCANA KERJA (RENJA)



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sitematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Tahun 2024.....	6
2.2 Analisis Kinerja pelayanan	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	8
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	8
2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	11
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	11
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	12
3.3 Program dan Kegiatan	13
BAB IV PENUTUP	14
Tabel RKPD	15

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 pada anggaran 2026.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Palu, 2025

Plt. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

RUSTAM ARIPPUDIN. S,Ag.,M.Si

Nip. 19710112 199803 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Biro Kesejahteraan Rakyat serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026. RENJA menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan selama satu tahun anggaran.

Penyusunan RENJA dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai peran strategis dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan tugas tersebut meliputi pembinaan mental spiritual, pelayanan dasar yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan sosial, serta pelayanan non dasar yang meliputi kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, tenaga kerja, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta perhubungan.

Penyusunan RENJA Tahun 2026 juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2025 sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan program dan kegiatan agar lebih efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi berbagai keberhasilan, kendala, tantangan, dan peluang yang akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat pada tahun berikutnya.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, Biro Kesejahteraan Rakyat berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, penguatan pembinaan kehidupan beragama dan mental spiritual masyarakat, serta peningkatan sinergi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.

Dokumen RENJA Tahun 2026 diharapkan menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana secara terarah, terukur, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan terakhirnya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang berlaku.
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

12. RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.
13. Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
15. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan tertentu di Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENJA Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat selama Tahun Anggaran 2026.

Tujuan

Penyusunan RENJA bertujuan untuk:

1. Menjabarkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
3. Meningkatkan keterpaduan, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat.
4. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Menjadi dasar pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2026 terdiri atas:

BAB I Pendahuluan,

memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen perencanaan, serta sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi RENJA Tahun 2025,

memuat evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu strategis, review terhadap RKPD Tahun 2026, serta penelaahan usulan program dan kegiatan.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah,

memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan daerah, tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2026.

BAB IV Penutup,

memuat kesimpulan dan harapan terhadap pelaksanaan RENJA sebagai pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat selama Tahun Anggaran 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2025

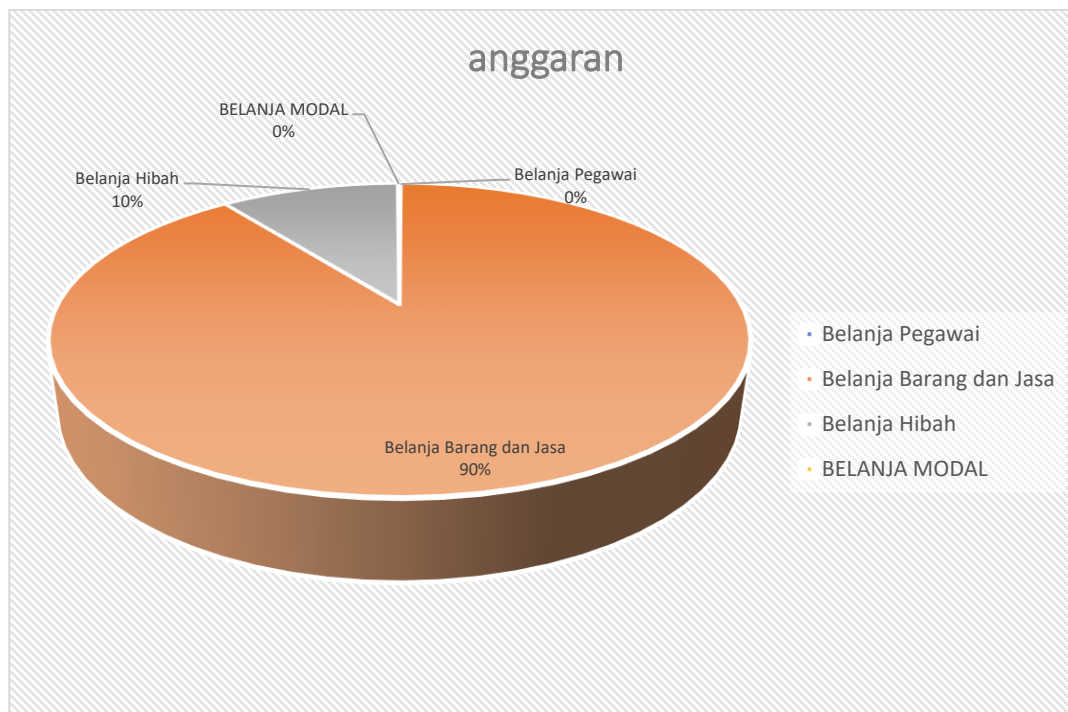
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan Renja Tahun 2026 dengan memperhatikan capaian indikator kinerja, realisasi anggaran, kendala pelaksanaan serta tindak lanjut perbaikan. Secara umum pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kesejahteraan Rakyat berjalan sesuai target, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang memerlukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan peningkatan efektivitas pelaksanaan.

Dalam pengalokasian anggaran pada biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sebesar Rp. 335.370.515.552 (tiga ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus limabelas ribu lima ratus limapuluh dua rupiah. Dengan belanja pegawai Rp.261.170.000, Belanja Barang dan Jasa Rp.300.901.098.127, Belanja Hibah Rp.34.208.247.425 an Belanja Moda Rp.356.782.696.

Proporsi Anggaran dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1



Pada gambar 2.1 diatas bahwa proporsi anggaran terserap pada belanja barang dan jasa dalam hal ini pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa yang memegang KTP Provinsi Sulawesi Tengah dan pemberian bantuan Hibah Keagamaan.

Dapat Juga dilihat dari di penjabaran Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Rincian Anggaran Perubahan Tahun 2025		
OPD : Biro Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah		
NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	335.370.515.552
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.433.893.241
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.025.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	787.370.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	34740000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190661000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	356782696
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42314545
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	422,280,000.00
2	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	333.936.622.311
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	55.522.624.183
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	39.942.275.200
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	15.580.348.983
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	266.902.922.422
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	266.676.513.872
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	147.478.550
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	78.930.000
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	334.136.300
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	181.565.800
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	86.698.700
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	65.871.800

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat diarahkan pada peningkatan kualitas koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat. Fokus pelayanan meliputi pembinaan mental spiritual, pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan sosial, serta pelayanan non pelayanan dasar. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan kualitas data, percepatan pelaporan, penguatan monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan teknologi informasi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinamika organisasi pemerintahan dewasa ini menuntut adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang lebih kreatif, inovatif dan adaptif. Oleh karenanya, selain dibutuhkan komitmen yang kuat dari penentu kebijakan juga adanya motivasi seluruh aparatur untuk bekerja lebih keras serta disiplin tinggi dalam Upaya mencapai tujuan yang diinginkan, untuk itu dapat dikemukakan isu strategis penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. peningkatan kompetensi SDM aparatur;
2. penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi;
3. peningkatan kualitas koordinasi antar perangkat daerah;
4. optimalisasi pengelolaan bantuan hibah keagamaan yang akuntabel;
5. peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan rakyat berbasis data;
6. digitalisasi administrasi dan pelaporan kinerja.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2026 diselaraskan dengan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Kesejahteraan Rakyat. Seluruh indikator, target dan pagu indikatif menjadi acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah. Dapat dilihat pada table RKPD dibawah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Usulan program dan kegiatan disusun berdasarkan hasil evaluasi Renja Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah, hasil forum perangkat daerah serta kebutuhan pelayanan masyarakat. Prioritas diarahkan pada peningkatan pelayanan administrasi, fasilitasi pembinaan mental spiritual, fasilitasi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan penyusunan RKA,DPA dan Dokumen Perencanaan lainnya, laporan capaian dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang akurat, terukur dan tepat waktu serta laporan capaian realisasi Keuangan SKPD yang akuntabel dan akurat.2.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Non ASN berdaya guna dalam membantu pekerjaan ASN.3.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan aparatur yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.4.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro dalam rangka koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah, Koordinasi Perencanaan Program, Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensinkronkan antara program & kegiatan Pusat, Propinsi serta kabupaten/kota.5.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang milik daerah Biro untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran, jasa, keuangan serta kebutuhan rutin kantor lainnya.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah Biro untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.

Program Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan, memverifikasi, penyaluran, monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana spiritual yakni Bantuan Hibah pada Rumah Ibadah, Yayasan/Organisasi/Lembaga dan Pendidikan Keagamaan, menyelenggarakan Kebijakan Pembinaan serta pengembangan Keagamaan pada tingkat Provinsi dan tingkat Nasional seperti Penyelenggaraan Ibadah Haji, MTQ/STQ, MQK, POSPENAS, Safari Ramadhan, PESRAWI (Protestan), BAMAG, PESPARANI (Katolik), Utsawa Dharma Gita, Seni Sakral (Hindu), Swayamvara Tripitaka Gatha, Yobbana Dhamma

- Samajja (Budha) dan Perayaan Hari Hari Besar Keagamaan serta mengkoordinasikan kebijakan kerjasama dan Lembaga Keagamaan.
- Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Kegiatan ini dilaksanakan untuk Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, Kebijakan dan Capaian Kinerja Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar pada Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Sosial.
- Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Kegiatan ini dilaksanakan untuk Koordinasi & Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I (Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata), Non Pelayanan Dasar II (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja) dan Non Pelayanan Dasar III (Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden dan Wakil Presiden.

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, yaitu **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra puteri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Visi ini dicapai melalui **Delapan Misi** yang dituangkan dalam Delapan **Asta Cita** sebagai berikut:

1. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)**
2. **Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**
3. **Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi**
4. **Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas**
5. **Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri**
6. **Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan**
7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan**
8. **Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur**

SEHINGGA

Perumusan tujuan dan sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2026 mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, RPJPD, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, RKPDP Tahun 2026 serta Renstra Sekretariat Daerah. Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, penguatan tata kelola

pemerintahan, pembangunan sumber daya manusia, penguatan kerukunan umat beragama, serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.

3.2 Tujuan DAN sASARAN

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam upaya pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah adalah mewujudkan kualitas masyarakat yang sehat dan cerdas. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan daerah maupun nasional. Kecerdasan masyarakat tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui peningkatan kualitas pendidikan formal maupun non-formal, pemerataan akses pendidikan, serta pengembangan potensi generasi muda, diharapkan tercipta masyarakat Sulawesi Tengah yang terdidik, berwawasan luas, dan siap menghadapi tantangan global. Dengan sinergi antara pembangunan di sektor kesehatan dan pendidikan, tujuan besar untuk menciptakan masyarakat Sulawesi Tengah yang sehat dan cerdas dapat tercapai secara berkelanjutan. Hal ini sekaligus menjadi pondasi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang cerdas, peningkatan kualitas pendidikan menjadi sasaran utama yang perlu dicapai. Sasaran ini mencakup berbagai aspek, antara lain pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu dan mahasiswa berprestasi di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, diharapkan akan lahir generasi muda Sulawesi Tengah yang memiliki daya pikir kritis, serta memiliki karakter yang unggul, sehingga mampu mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat lokal maupun nasional.

Tujuan dan Sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat mengacu pada Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk Pembangunan Daerah yang lebih efektif.
2. Dimanfaatkannya Jasa PHL dalam Pelayanan Administrasi Kantor.
3. Dimanfaatkannya sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
4. imanfaatkannya Pelayanan Administrasi Umum Kantor.
5. Dimanfaatkannya Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah.
6. Dimanfaatkannya Hasil Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Dimanfaatkannya Hasil Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Keagamaan, Pemberian bantuan sarana peribadatan serta pendidikan keagamaan.

9. Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terkait Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.
10. Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terkait Non Pelayanan Dasar I, II dan III .

3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Program yang dilaksanakan terdiri atas:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi:

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja.
- Administrasi Keuangan.
- Administrasi Kepegawaian.
- Administrasi Umum.
- Pengadaan Barang Milik Daerah.
- Penyediaan Jasa Penunjang.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

B. Program Kesejahteraan Rakyat:

- Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual.
- Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.
- Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.

Seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Tahun 2026 serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan kondisi yang realistis dari perencanaan kegiatan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Keseimbangan gerak pembangunan mengisyaratkan bahwa aktifitas perencanaan harus bergulir dan mengalami perbaikan-perbaikan untuk peningkatan kualitasnya. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalam Rencana Kerja ini, namun Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 tergantung pada sikap, mental, tekad serta semangat dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitannya maka diharapkan seluruh aparat Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menjadikan Rencana Kerja Anggaran di setiap bagian sebagai dokumen yang mengacu pada Renja Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2025-2029 sehingga pelaksanaan rencana berjalan secara sistematis dan sinergis.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)																				
SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH																				
TAHUN 2026																				
No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Biro Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah						724.682.109.710,34	313.234.443.787,99	358.949.487.175,90							89.942.824.340,43		
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						724.682.109.710,34	313.234.443.787,99	358.949.487.175,90							89.942.824.340,43		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH						724.682.109.710,34	313.234.443.787,99	358.949.487.175,90							89.942.824.340,43		
11	4	01	01						108.591.361.182,34	116.459.303.477,99	138.420.741.883,90							29.775.536.619,43		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	-		87 Indeks	87 Indeks												
4	01	01	1.01				1 Laporan	1 Laporan	307.208.435,00	141.599.950,00	141.599.950,00				Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas	Perangkat Daerah	116.590.950,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-															
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
							1 Laporan	1 Laporan	30.720.290,00	7.350.000,00	7.350.000,00		Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas		51.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH	
4	01	01	1.02				2 Dokumen	2 Dokumen	70.391.219.788,34	78.427.391.648,30	78.427.391.648,30				Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas	Perangkat Daerah	3.510.014.000,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-															
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas															
							2 Dokumen	2 Dokumen	844.710.000,00	184.100.000,00	300.220.000,00		Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas		1.299.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH	
4	01	01	1.05				4 Orang	4 Orang	739.423.801,00	145.403.276,00	145.403.276,00				Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas	Perangkat Daerah	858.636.595,60	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-															
4	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan															
							6 Orang	6 Orang	50.080.000,00	0,00	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas		115.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH	
4	01	01	1.06				1 Laporan	1 Laporan	6.796.638.023,00	8.854.415.780,00	8.854.415.780,00				Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas	Perangkat Daerah	3.566.537.501,50	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-															
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan															
							1 Laporan	1 Laporan	200.616.450,00	96.794.000,00	96.794.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas		460.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH	
4	01	01	1.07				18 Unit	18 Unit	135.225.960,00	0,00	0,00				Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas	Perangkat Daerah	585.720.000,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-															
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							18 Unit	18 Unit	24.571.160,00	0,00	0,00		Kota Palu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas		563.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH	
4	01	01	1.08				1 Laporan	1 Laporan	10.417.546.645,00	6.145.033.258,00	6.145.033.258,00				Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas	Perangkat Daerah	2.003.789.743,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-															

BIRO KESEJATERAAN RAKYAT

4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor					1 Laporan	1 Laporan	72.342.250,00	40.696.000,00	72.868.000,00	Kota Pahu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas				184.556.313,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	90 Unit	5.797.665.292,00	5.717.409.160,00	5.717.409.160,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas	Perangkat Daerah			3.379.855.000,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				96 Unit	96 Unit	517.060.000,00	42.160.000,00	206.410.000,00	Kota Pahu, Palu Timur, Besusu Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas				345.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH
12	4	01	04		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kenyamanan Umum Beragama (IKUB) Dimensi Kesejahteraan				78	78	607.666.062.368,00	195.910.600.000,00	218.042.195.232,00								57.291.465.796,00	
						Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (%)				43,54	43,54												
4	01	04	1.01		Facilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				100 %	100 %	81.112.062.518,00	65.210.600.000,00	65.210.600.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas	Masyarakat			53.841.465.796,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH
4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola				600 Unit	600 Unit	70.992.062.518,00	65.210.600.000,00	73.580.239.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas				33.141.465.796,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH
4	01	04	1.01	0002	Facilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				5 Lembaga	5 Lembaga	10.120.000.000,00	0,00	13.761.956.232,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas				20.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH
4	01	04	1.02		Facilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				1 Dokumen	1 Dokumen	525.359.999.850,00	130.700.000.000,00	130.700.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas	Masyarakat			1.725.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH
4	01	04	1.02	0001	Facilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	525.119.999.850,00	130.700.000.000,00	130.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas				575.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH
4	01	04	1.02	0002	Facilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas				575.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH
4	01	04	1.02	0003	Facilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas				575.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH
4	01	04	1.03		Facilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.194.000.000,00	0,00	0,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas	Masyarakat			1.725.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH
4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	954.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas				575.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH
4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas				575.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH
4	01	04	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Berani Cerdas				575.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH
J U M L A H												724.682.109.710,34	313.234.443.787,99	358.949.487.175,90								89.942.824.340,43	

RENJA TAHUN

